



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor: 800/BKD/20.23 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Validasi Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah dan Nomor: 800/BKD/349 tanggal 19 Februari 2019 perihal Validasi Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, telah disampaikan Dokumen Evaluasi Jabatan yang disusun Pemerintah Provinsi Riau kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- b. bahwa surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/862/M.SM.04.00/2019 tanggal 22 Juli 2019 hal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, berdasarkan validasi hasil evaluasi jabatan, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

Pasal 1

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan agar Perangkat Daerah memiliki standar minimal jumlah, komposisi Pegawai Negeri Sipil, jabatan yang tepat sesuai kualifikasi dan kompetensi berdasarkan kebutuhan unit kerja organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman penetapan kelas dan nilai jabatan yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan formasi, perumusan pengembangan Pegawai Negeri Sipil, mutasi dan redistribusi Pegawai Negeri Sipil serta pemberian tunjangan kinerja.

Pasal 2

Kelas dan Nilai Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Apabila terjadi perubahan Nomenklatur Jabatan, maka Jabatan dengan Nomenklatur yang baru disesuaikan dengan Kelas dan Nilai Jabatan berdasarkan Peraturan Gubernur ini yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

MASRUL KASMY

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR : 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
NP.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

KELAS JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
	SEKRETARIAT DAERAH		
1	Sekretaris Daerah	16	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	15	
	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
3	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	14	
4	Kepala Bagian Pemerintahan	12	
5	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	9	
6	Kepala Subbagian Pencatatan Sipil dan Kependudukan	9	
7	Kepala Subbagian Perangkat Pemerintahan	9	
8	Kepala Bagian Otonomi Daerah	12	
9	Kepala Subbagian Kepala Daerah dan DPRD	9	
10	Kepala Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah	9	
11	Kepala Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	9	
12	Kepala Bagian Perbatasan	12	
13	Kepala Subbagian Perbatasan Antar Negara	9	
14	Kepala Subbagian Perbatasan Antar Daerah	9	
15	Kepala Subbagian Administrasi Wilayah Pemerintahan	9	
	BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT		
16	Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	14	
17	Kepala Bagian Kerukunan Umat Beragama	12	
18	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	9	
19	Kepala Subbagian Fasilitasi dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama	9	
20	Kepala Subbagian Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Sarana Prasarana Rumah Ibadah	9	
21	Kepala Bagian Kepemudaan dan Olahraga, Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan	12	
22	Kepala Subbagian Pendidikan dan Kebudayaan	9	
23	Kepala Subbagian Sosial	9	
24	Kepala Subbagian Kepemudaan dan Olahraga	9	
25	Kepala Bagian Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12	
26	Kepala Subbagian Kesehatan dan Keluarga Berencana	9	
27	Kepala Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	
28	Kepala Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	
	BIRO HUKUM		
29	Kepala Biro Hukum	14	
30	Kepala Bagian Perundang-Undangan	12	

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1238	Kepala Bidang Penunjang Medik	11	
1239	Kepala Seksi Perencanaan Penunjang Medik	8	
1240	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Penunjang Medik	9	
JUMLAH			

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

KELAS JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	14	
2	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Infrastruktur	14	
3	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemasyarakatan	14	
4	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	
5	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	
	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
	BAGIAN PEMERINTAHAN		
	SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO		
6	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	
7	Pengadministrasian Persuratan	5	
8	Pengelola Keuangan	6	
9	Pengelola Program dan Kegiatan	6	
10	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	
11	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	
	SUBBAGIAN PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN		
12	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	
13	Pengelola Program dan Kegiatan	6	
14	Pengolah Data	6	
	SUBBAGIAN PERANGKAT PEMERINTAHAN		
15	Analisis Dekonsentrasi	7	
16	Analisis Pemerintahan Daerah	7	
17	Analisis Sinergitas Penugasan Urusan Pemerintah	7	
18	Pengadministrasian Pemerintahan	5	
19	Pengelola Program dan Kegiatan	6	
	BAGIAN OTONOMI DAERAH		
	SUBBAGIAN DAERAH DAN DPRD		
20	Analisis Pemerintahan Daerah	7	
21	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	
22	Pengelola Program dan Kegiatan	6	
	SUBBAGIAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH		
23	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	7	
24	Pengadministrasian Otonomi Daerah	5	
25	Pengelola Pengembangan Otonomi Daerah	6	
	SUBBAGIAN PELAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		
26	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
	2	3	4
1 5328	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	
5329	Perekam Medis Penyelia	8	
5330	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	
5331	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	
5332	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	
5333	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8	
5334	Psikolog Klinis Ahli Pertama	8	
5335	Radiografer Pelaksana	6	
5336	Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	
5337	Radiografer Penyelia	8	
5338	Refraksionis Optisien Pelaksana	6	
5339	Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	
5340	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	
5341	Teknisi Elektromedis Penyelia	8	
5342	Analisis Gizi	7	
5343	Analisis Kesehatan	7	
5344	Pengelola Kefarmasian	6	
5345	Pengolah Data Pelayanan	6	
5346	Penyuluh Obat dan Makanan	7	

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NILAI JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 RUANG LINGKUP & DAMPAK (LEVEL 1-5)	FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (LEVEL 1-3)	FAKTOR 3 WEWENANG PENYELIAAN & MANAJERIAL (LEVEL 1-3)	FAKTOR 4 HUBUNGAN PERSONAL			FAKTOR 5 KESULTAN PENGARAHAN PEKERJAAN (LEVEL 1-8)	FAKTOR 6 KONDISI LAIN (LEVEL 1-6)						
							SIPAT HUB. (LEVEL 1~4)	TIJUAN HUB. (LEVEL 1~4)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
0	SEKRETARIAT DAERAH																
1	Sekretaris Daerah	16	3,755	3	550	3	350	3	900	4	100	4	125	4	505	5	1,225
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	15	3,400	3	550	2	250	2	775	4	100	3	100	4	505	4	1,120
2	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH																
3	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	14	2,840	2	350	2	250	2	775	3	75	2	75	3	340	3	975
4	Kepala Bagian Pemerintahan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
5	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
6	Kepala Subbagian Pencatatan Sipil dan Kependudukan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
7	Kepala Subbagian Perangkat Pemerintahan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
8	Kepala Bagian Otonomi Daerah	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
9	Kepala Subbagian Kepala Daerah dan DPRD	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
10	Kepala Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 RUANG LINGKUP & DAMPAK (LEVEL 1~5)	FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (LEVEL 1~3)	FAKTOR 3 WEWENANG PENYELIAAN & MANAJERIAL (LEVEL 1~3)	FAKTOR 4 HUBUNGAN PERSONAL				FAKTOR 5 KESULTAN PENGARAHAN PEKERJAAN (LEVEL 1~8)	FAKTOR 6 KONDISI LAIN (LEVEL 1~6)			
							SIFAT HUB. (LEVEL 1~4)	TUJUAN HUB. (LEVEL 1~4)							
1238	Kepala Bidang Penunjang Medik	11	2,045	1	175	1	100	2	50	1	30	3	340	2	575
1239	Kepala Seksi Perencanaan Penunjang Medik	8	1,295	1	175	1	100	1	25	1	30	2	205	1	310
1240	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Penunjang Medik	9	1,430	1	175	1	100	1	25	1	30	3	340	1	310

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

NILAI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR 76 TAHUN 2020
 TENTANG
 KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1~9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1~5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1~5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1~6)		Faktor 5 R lingkup & Pengaruh (Level 1~6)		Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1~4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
1	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Sekretariat Daerah	14	2,890	7	1,250	4	450	4	450	5	325	4	225	3	60	3	120	1	5	1	5
2	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Infrastruktur	Sekretariat Daerah	14	2,890	7	1,250	4	450	4	450	5	325	4	225	3	60	3	120	1	5	1	5
3	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemasyarakatan	Sekretariat Daerah	14	2,890	7	1,250	4	450	4	450	5	325	4	225	3	60	3	120	1	5	1	5
4	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	Sekretariat Daerah	11	1,870	6	950	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
5	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Sekretariat Daerah	12	2,135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH																					
	BAGIAN PEMERINTAHAN																					
	SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO																					
6	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Subbagian Tata Usaha Biro	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
7	Pengadministrasi Persuratan	Subbagian Tata Usaha Biro	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KEJAS JABATAN	NILAI JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1~9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1~5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1~5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1~6)		Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)		Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1~4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)	
5343	Analis Kesehatan	Seksi Monitoring Dan Evaluasi Penunjang Medik	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
5344	Pengelola Kefarmasian	Seksi Monitoring Dan Evaluasi Penunjang Medik	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
5345	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Monitoring Dan Evaluasi Penunjang Medik	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
5346	Penyuluh Obat dan Makanan	Seksi Monitoring Dan Evaluasi Penunjang Medik	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR